



DAMPAK PEMBANGUNAN JEMBATAN RUMPIANG TERHADAP PEREKONOMIAN MASYARAKAT DI KECAMATAN CERBON KABUPATEN BARITO KUALA

Akhmad Abdurahman

STIA Bina Banua Banjarmasin

akhmad.abdurahman@stiabinabanuabjm.ac.id.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Mengkaji dan mengevaluasi dampak Jembatan Rumpiang terhadap Aspek Perekonomian Masyarakat di Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala, dan (2) Menemukan dan memformulasikan strategi dalam mengantisipasi dampak Jembatan Rumpiang di Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala.

Penelitian ini menggunakan Metode Deskriptif Kualitatif. Populasi penelitian adalah masyarakat di wilayah Kecamatan Cerbon. Sampel Penelitian ditarik secara Purposive Sampling. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ; (1) Dampak positif keberadaan Jembatan Rumpiang adalah semakin terbukanya peluang usaha bagi masyarakat yang memiliki keahlian dan modal yang cukup, sedangkan dampak negatifnya adalah hilangnya lapangan pekerjaan dan mata pencaharian masyarakat yang bergerak di bidang jasa angkutan dan penyeberangan klotok dan ferry dan perubahan status dan fungsi lahan pertanian dan perkebunan menjadi lahan perumahan dan pertokoan, dan (2) Strategi yang disusun dan dirumuskan pemerintah Kecamatan Cerbon dalam mengantisipasi dampak yang timbul dengan adanya Jembatan Rumpiang, adalah a). Menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan mampu berpartisipasi dalam pembangunan, b).Melakukan Mapping (pemetaan) terhadap berbagai permasalahan pembangunan, dan c). Menyusun desain tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, dengan pelayanan yang berkualitas.

Kata Kunci: Dampak Ekonomi Kebijakan Pembangunan, Dampak Ekonomi, Dampak Kebijakan Pembangunan

Pembangunan adalah kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh lapisan masyarakat, karena itu setiap kegiatan pembangunan adalah ditujukan untuk memperbaiki atau menciptakan sesuatu yang baru bagi kepentingan masyarakat luas

Banyak faktor yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh proses pembangunan. Letak geografis dan potensi suatu wilayah merupakan bagian dari berbagai faktor yang mempengaruhi dan sekaligus juga dipengaruhi oleh proses pembangunan dalam rangka lebih mensejahterakan kehidupan masyarakat.

Salah satu bentuk dari hasil kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan adalah berdirinya Jembatan Rumpiang yang menghubungkan Kota Marabahan dengan Kota Banjarmasin melalui Kecamatan Cerbon.

Jembatan Rumpiang tentunya akan berdampak pada perekonomian masyarakat di Kecamatan Cerbon, yaitu terlihat dari adanya perubahan pendapatan dan kegiatan usaha yang dijalankan masyarakat, baik dalam bentuk pembukaan usaha baru, maupun arus distribusi barang dan jasa.

Dari gambaran perubahan kondisi perekonomian masyarakat sebagaimana tersebut di atas, nampak bahwa dampak yang terambar tersebut adalah dampak yang bersifat positif. Akan tetapi, berdirinya Jembatan Rumpiang tidak menutup kemungkinan juga akan berdampak negatif, terhadap aspek perekonomian masyarakat, yaitu adanya anggota masyarakat yang kehilangan pekerjaan yang menjadi mata pencaharian mereka.

Untuk mengkaji lebih dalam tentang dampak yang ditimbulkan oleh adanya pembangunan Jembatan Rumpiang ini, maka peneliti mengambil judul **“Dampak Jembatan Rumpiang Terhadap Perekonomian Masyarakat Di Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala”**

Mengacu pada latar belakang di atas, maka masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut : Bagaimana dampak Jembatan Rumpiang terhadap Perekonomian Masyarakat di Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala ? dan Bagaimana strategi untuk mengantisipasi dampak Jembatan Rumpiang di Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala ?

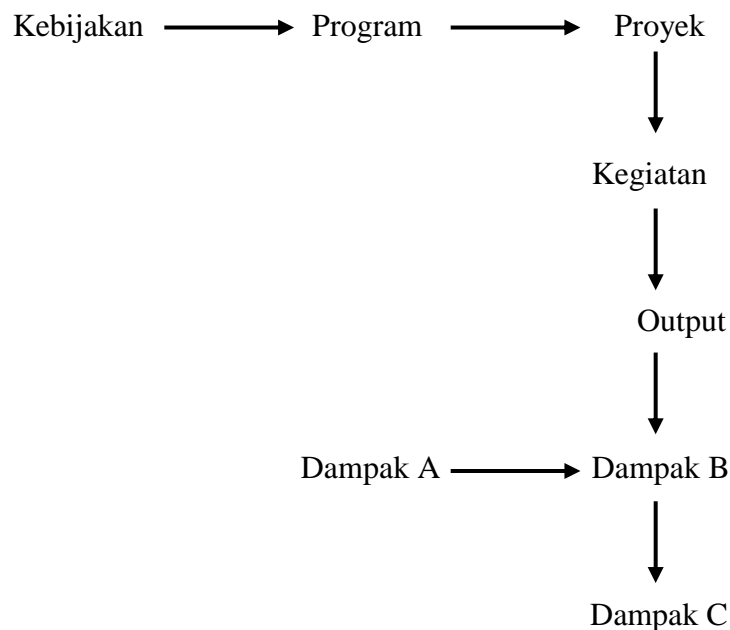
Mengacu pada perumusan masalah sebagaimana dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah : Mengkaji dan mengevaluasi dampak Jembatan Rumpiang terhadap Perekonomian Masyarakat di Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala. Dan Menemukan dan memformulasikan strategi dalam mengantisipasi dampak Jembatan Rumpiang di Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala.

Tinjauan Teoritis

Menurut Anwar (2005), yaitu “pembangunan wilayah dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan wilayah yang mencakup aspek-aspek pertumbuhan, pemerataan dan keberlanjutan yang berdimensi lokasi dalam ruang dan berkaitan dengan aspek sosial ekonomi wilayah”.

A. Pengertian Dampak

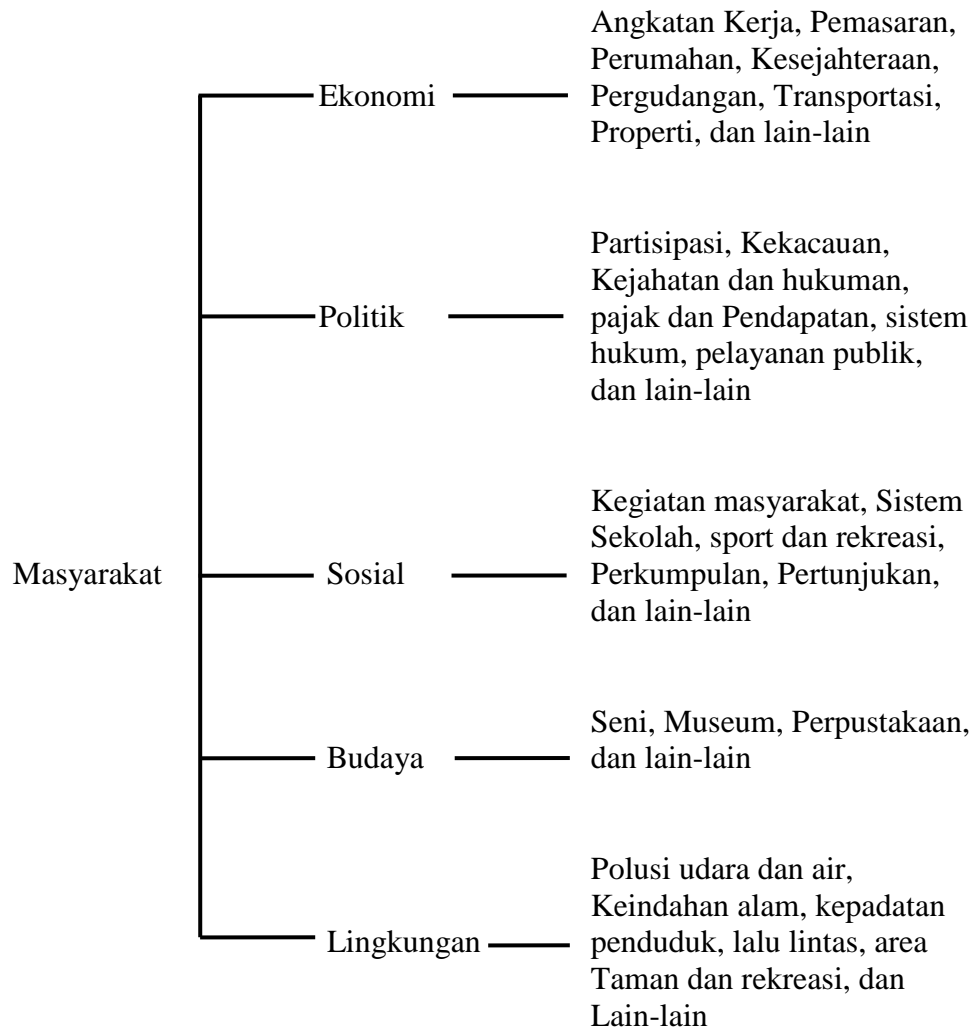
Hubungan antara pelaksanaan suatu kebijakan publik dengan outputnya serta dampak implementasi tersebut menurut Samodra, et al (1994 : 6) secara singkat dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1. Hubungan Kebijakan Publik, Output, dan Dampak
Sumber : Samodra, 1994

Longbein dalam Samodra, (1994 : 18) mengemukakan adanya empat dimensi dampak yang penting untuk diperhatikan, yaitu : waktu, selisih antara dampak aktual yang diharapkan, tingkat agregasi dampak, dan jenis dampak. Pelaksanaan dari suatu kebijakan dapat berdampak dengan segera maupun dalam jangka panjang.

Finsterbusch and Moth dalam Samodra (1994 : 45) mengemukakan bahwa dampak kebijakan publik terhadap masyarakat terdiri dari lima aspek, sebagaimana gambaran berikut :



Gambar 2. Dampak Kebijakan Publik terhadap Masyarakat
Sumber : Samodra, 1994.

B. Pembangunan Infrastruktur

Jembatan dan jalan merupakan infrastruktur yang sangat erat hubungannya dengan jaringan transportasi dan pembangunan masyarakat serta perkembangan lingkungan. Oleh karena itu, setiap pembangunan infrastruktur selalu memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai aspek yang terkait di sekitar

lingkungan pembangunan infrastruktur tersebut, seperti aspek ekonomi, aspek politik dan pemerintahan, serta aspek sosial budaya masyarakat.

Iwan Nugroho dan Rokhmin Dahuri (2004 :126) menyatakan jalan dan jembatan sebagai salah satu jaringan transportasi sangat erat kaitannya dengan tata guna lahan. Dampak pada aspek lingkungan, bukan saja lahan sebagai wadah fisik kedudukan sistem peradaban, tetapi juga memberi masukan ke, menerima hasil dari, dan memperbaiki kerusakan sistem produksi.

Iwan Nugroho dan Rokhmin Dahuri (2004 : 49) mengemukakan bahwa Proses yang terjadi sangatlah kompleks, karena melibatkan aspek ekonomi, aspek sosial, lingkungan dan politik (pemerintah), sehingga pada hakekatnya merupakan suatu “sistem” pembangunan wilayah yang tidak dapat dipisah-pisahkan.

Hubungan dan keterkaitan antara pembangunan infrastruktur yang berupa jalan dan jembatan dengan pembangunan wilayah adalah sangat erat, hal ini dikarenakan bahwa keberadaan suatu jalan atau jembatan memberikan andil yang besar terhadap perkembangan suatu wilayah, tidak hanya terbatas pada wilayah secara administratif. Suatu wilayah akan dapat berkembang dan tumbuh karena adanya infrastruktur berupa jalan dan jembatan yang merupakan prasarana transportasi dan mobilisasi penduduk dan tentu saja juga berfungsi sebagai prasarana yang dapat menghubungkan antara satu wilayah dengan wilayah yang lainnya.

Pembangunan infrastruktur yang berupa jalan dan jembatan yang memungkinkan terjadi hubungan antara wilayah tentunya akan menimbulkan dampak dari berbagai aspek kehidupan, baik pemerintahan, perekonomian maupun

sosial budaya bagi masyarakat secara umum, terutama bagi masyarakat yang tinggal disekitar lokasi pembangunan jalan dan jembatan tersebut. Dan dampak yang ditimbulkan oleh adanya pembangunan infrastruktur yang berupa jalan dan jembatan bagi masyarakat disekitarnya tentu saja ada yang bersifat positif dan ada pula yang bersifat negatif.

Dengan adanya pembangunan infrastruktur yang berupa prasarana jalan dan jembatan, menuntut semua kalangan untuk dapat mengantisipasi berbagai dampak yang ditimbulkan, baik positif maupun negatif.

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif.

2. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh lapisan dan tokoh masyarakat di Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala.

Sejalan dengan populasi dan metode yang digunakan dalam penelitian ini, maka sampel penelitian di tarik dengan menggunakan teknik Purposive Sampling. Sehingga yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah :

1. Kepala Desa dan Sekretaris Desa se Kecamatan Cerbon
2. Tokoh Masyarakat Desa se Kecamatan Cerbon

3. Key Informan

Untuk kelengkapan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan sampel penelitian, maka dalam penelitian ini juga digunakan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Key Informan, yaitu Aparat Kantor Kecamatan Cerbon.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam upaya menghimpun data yang dipergunakan dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa Wawancara, Survei, dan Dokumentasi.

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik analisa deskriptif kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Jembatan Rumpiang

Proyek Pembangunan Jembatan Rumpiang terletak pada Kabupaten Barito Kuala melintasi sungai Barito. Panjang total jembatan 754 m, merupakan konstruksi khusus dengan bentuk Arch Rangka Baja pada bentang utama dan komposit girder pada bentang pendekatnya. Pendanaan merupakan sharing antara APBN, APBD I dan APBD II.

Proyek dimulai pada bulan Januari tahun 2004 Pemancangan Pertama dilakukan oleh Gubernur Kalimantan Selatan Drs. H Sjachriel Darham pada tanggal 05 Januari 2004. Sampai dengan bulan April 2007 progress secara total mencapai **83.720 %**.

1. Panjang Jembatan : 753.82 m dengan Bentang Pendekat komposit Girder dan Bentang Utama : Steel Arch bentang 200 m
2. Konstruksi Bangunan
 - Tipe Jembatan Utama : Steel Arch Bridge
 - Panjang Bentang : 200 m
 - Tinggi Ruang Bebas : 15 m dari Elevasi Muka Air Tertinggi
 - Lebar Jembatan : 9 m(7m perkerasan) (2x1 m trotoar)
 - Data Pembebanan : Bridge Management System (BMS 92)
 - Bekisting Lantai : Steel formwork tebal 0,75 mm
 - Lantai Jembatan : Mutu K-350
 - Besi Tulangan : Diameter 13 & 16 mm $F_y = 390$ Mpa

B. Dampak terhadap Perekonomian Masyarakat

Dampak yang sangat terasa dan bersentuhan langsung dengan masyarakat di wilayah pemerintahan Kecamatan Cerbon, terutama bagi masyarakat yang berdomisili dan bertempat tinggal di sepanjang jalan menuju dan dari Jembatan Rumpiang adalah dampak yang terjadi pada aspek perekonomian masyarakat.

Dampak keberadaan jembatan rumpiang terhadap aspek perekonomian masyarakat tergambar dari terjadi perubahan dan pergantian lahan pekerjaan yang menjadi mata pencarian masyarakat disekitar lokasi jembatan rumpiang dan sepanjang jalan menuju dan dari jembatan rumpiang dengan terbukanya akses jalan darat yang semakin mudah dan lancar.

Dalam wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat menyatakan :
“Dengan adanya jembatan rumpiang banyak anggota masyarakat yang berganti gawian (pekerjaan), yang dulunya pengusaha taksi klotok dan ferry penyeberangan, wayah ini (sekarang) ada yang menjadi tukang ojek, ada yang membuka warung makan, dan ada jua yang babulik jadi petani aja” (Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat desa, 2010.

Memperhatikan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat tersebut, dapat diperoleh gambaran bahwa dengan adanya jembatan rumpiang mengakibatkan terjadinya perubahan kegiatan ekonomi masyarakat, dimana yang dulunya aktivitas perekonomian lebih banyak dilaksanakan di perairan (di atas sungai barito), sekrang banyak dilakukan di daratan.

Di samping itu, jika di telaah secara lebih mendalam, juga diperoleh gambaran bahwa dengan adanya jembatan rumpiang ternyata dampak yang ditimbulkan pada aspek perekonomian masyarakat tidak saja yang bersifat positif, akan tetapi juga menimbulkan dampak yang berfifat negatif.

Dampak yang bersifat positif adalah semakin terbukanya peluang usaha bagi masyarakat yang memiliki keahlian dan modal yang cukup, yaitu dengan membuka usaha jasa bengkel service untuk angkutan darat, baik sepeda, sepeda motor atau mobil, juga dengan membuka usaha toko atau rumah makan di sepanjang jalan menuju dan dari jembatan rumpiang.

Dampak positif dari keberadaan jembatan rumpiang juga tergambar dari semakin lancarnya arus barang hasil pertanian dari desa di wilayah sekitar berdirinya jembatan, sehingga pemasaran hasil pertanian dan pekerbunan lebih

mudah dan lancar, terutama ke pasar di ibu kota Kabupaten Barito Kuala, yaitu Kota Marabahan. Dengan terbukanya akses jalan seiring dengan beroperasinya jembatan rumpiang juga berakibat pada semakin meningkatnya harga tanah yang berada disepanjang jalan utama menuju dari jembatan rumpiang ke kota Marabahan atau kota Banjarmasin serta semakin terbukanya kesempatan untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak bagi masyarakat

Sementara itu, dampak negatif yang ditimbulkan dengan berdirinya jembatan rumpiang sangat dirasakan oleh masyarakat yang sebelum adanya jembatan tersebut berusaha di sektor jasa taksi klotok dan ferry penyeberangan, karena dengan adanya jembatan rumpiang mengakibatkan lahan pekerjaan sebagai mata pencarian utama mereka menjadi hilang dan harus beralih kepada bentuk usaha lain. Bagi mereka yang memiliki modal cukup besar, tentunya tidak menjadi masalah dengan tidak beroperasinya jasa taksi klotok dan ferry penyeberangan mereka, khususnya bagi pemilik klotok dan ferry penyeberangan karena dapat mengalihkannya pada bentuk usaha yang lain, sementara bagi mereka yang tidak memiliki modal, terutama buruh jasa taksi klotok dan ferry penyeberangan, tentu saja dengan adanya adanya jembatan rumpiang dan matinya usaha jasa taksi klotok dan ferry penyeberangan menimbulkan masalah besar, karena sumber mata pencarian mereka hilang yang berakibat pada terganggunya pendapatan dan kehidupan keluarga mereka.

Hasil wawancara peneliti dengan beberapa kelapa desa di wilayah pemerintahan kecamatan Cerbon menunjukkan bahwa : *“Kasihannya sekali*

bubuhannya yang gawianya menaksi klotok dan ferry penyeberangan, setelah adanya jembatan rumpiang ini usaha bubuhannya jadi mati (Tdiak beroperasi lagi), apalagi bubuhannya yang menjadi buruh taksi dan ferry penyeberangan, karena bubuhannya hanya maambil upah, setelah ada jembatan ini kadada lagi baisi gawian” (Hasil wawancara dengan beberapa kepala desa, 2010).

Dari hasil wawancara tersebut di atas, tergambar bahwa dengan adanya jembatan rumpiang, ternyata dampak negatif yang ditimbulkannya adalah sangat terasa bagi masyarakat yang tidak memiliki modal dan keahlian, karena dengan hilangnya pekerjaan mereka sebelumnya sebagai buruh taksi klotok dan ferry penyeberangan tidak ada lagi jenis pekerjaan yang dapat mereka usahakan sebagai akibat tidak adanya keahlian yang mereka miliki, terkecuali bagi mereka yang masih memiliki lahan pertanian atau perkebunan dapat kembali bertani atau berkebun.

Dampak negatif lainnya yang timbul dengan adanya jembatan rumpiang adalah terjadinya perubahan status dan fungsi tanah atau lahan, yang sebelumnya lahan pertanian dan perkebunan, dengan berdiri dan beroperasinya jembatan rumpiang mengalami perubahan menjadi lahan perumahan dan pertokoan. Terjadi perubahan status dan fungsi lahan ini pada gilirannya akan berakibat pada terjadi penurunan hasil pertanian dan perkebunan masyarakat di wilayah kecamatan Cerbon.

C. Strategi dalam Menghadapi Dampak Keberadaan Jembatan Rumpiang

Pembangunan dan operasionalisasi Jembatan Rumpiang di wilayah Kecamatan Cerbon memberikan dampak yang sangat luas bagi wilayah

kecamatan tersebut, terutama dengan terjadi perubahan lingkungan dan kondisi pemerintahan serta sosial ekonomi kemasyarakatan.

Mengantisipasi agar dampak yang timbul dari keberadaan jembatan rumpiang ini lebih banyak yang bersifat positif bagi masyarakat dan lingkungan di wilayah kecamatan Cerbon secara umum, khususnya lingkungan dan masyarakat disekitar lokasi jembatan rumpiang tersebut, pemerintah daerah Kabupaten Barito Kuala, khususnya Kecamatan Cerbon harus dapat merumuskan dan menetapkan strategi yang tepat agar dampak yang ditimbulkan tersebut dapat dijadikan sebagai suatu keunggulan bagi wilayah dan desa di kecamatan Cerbon.

Upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Barito Kuala diantaranya adalah dengan meningkatkan dan memaksimalkan penyelenggaraan kewenangan daerah di bidang pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan masyarakat, serta tugas-tugas umum pemerintahan, melalui :

1. Kebijakan pemerintah daerah yang menempatkan pembanguan infrastruktur perdesaan di wilayah kecamatan Cerbon secara komprehensif dan terpadu sebagai salah satu agenda peningkatan kesejahteraan rakyat.
2. Peran strategis kantor kecamatan Cerbon dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat serta tugas-tugas umum pemerintahan lainnya yang difokuskan pada kegiatan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan pemerintahan desa.

3. Mengembangkan dan meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan melalui penguatan kapasitas lembaga pemerintahan di kecamatan, pemerintahan desa, serta kelembagaan masyarakat desa, pengembangan pola pembangunan partisipatif, pemantapan nilai-nilai sosial budaya dan peningkatan pelayanan sosial dasar bagi masyarakat.
4. Pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat, pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup dengan mendayagunakan teknologi tepat guna, secara berkelanjutan mengembangkan berbagai program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan akses masyarakat dalam mengembangkan kegiatan pemberdayaan manusia dan usaha ekonomi masyarakat
5. Memberdayakan masyarakat miskin secara komprehensif melalui berbagai kebijakan dan program pengentasan kemiskinan sesuai karakteristik masalah dan kebutuhan keluarga miskin dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat.
6. Memberikan ketegasan dalam sosialisasi pemerintahan desa bahwa rangkaian penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan rangkaian yang utuh dan tidak terpisahkan sebagai satu kesatuan dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan baik daerah maupun negara, dan sebagai unit terdepan dalam pemberian pelayanan bagi masyarakat, serta memiliki posisi

strategis dalam mendukung dan membantu proses pencapaian keberhasilan berbagai kebijakan dan program pembangunan.

Mengacu pada berbagai upaya dan kebijakan yang dirumuskan, ditetapkan dan dijalankan oleh pemerintah Kabupaten Barito Kuala, khususnya pemerintah Kecamatan Cerbon, secara garis besar dalam upayanya meminimalisasikan dampak negatif dan mengoptimalisasikan dampak positif dari pembanguna Jembatan Rumpiang di wilayah Kecamatan Cerbon, maka strategi yang dirumuskan dan disusun adalah berupa :

1. Menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan mampu berpartisipasi dalam pemabngunan yang dilaksanakan sebagai wujud dari upaya pembangunan masyarakat Kecamatan Cerbon seutuhnya berbasis pada sosio kultural yang terintegrasi, dengan menempatkan manusia sebagai sentral , mengingat peran dan partisipasi serta keterlibatannya baik sebagai subjek maupun sebagai objek pembangunan.
2. Melakukan Mapping (pemetaan) terhadap berbagai permasalahan pembangunan mulai dari aspek geografis, aspek ekonomi, aspek sosial budaya, dan infrastruktur dengan mengacu pada pengembangan peluang dan kesempatan kerja serta berusaha bagi masyarakat Kecamatan Cerbon.
3. Menyusun desain tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih dari kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN). Menumbuhkan rasa memiliki terhadap kesempatan, peluang, ancaman, dan tantangan pembangunan menuju peningkatan kemampuan pembangunan yang

bertumpu pada kesadaran akan tanggung jawab dan tugas sebagai kalifah di muka bumi.

Kesimpulan

Mengacu pada tujuan dan hasil penelitian, dapat dikemukakan kesimpulan, sebagai berikut :

3. Dampak berdirinya Jembatan Rumpiang terhadap perekonomian masyarakat di wilayah Kecamatan Cerbon bersifat positif dan negatif. Dampak positif adalah semakin terbukanya peluang usaha bagi masyarakat yang memiliki keahlian dan modal yang cukup, yaitu dengan membuka usaha jasa bengkel service untuk angkutan darat, baik sepeda, sepeda motor atau mobil, juga dengan membuka usaha toko atau rumah makan di sepanjang jalan menuju dan dari jembatan rumpiang, serta meningkatnya harga tanah.

Sedangkan dampak negatifnya adalah hilangnya lahan pekerjaan dan mata pencarian masyarakat bergerak di bidang jasa angkutan dan penyeberangan klotok dan ferry, dan berubahnya status dan fungsi lahan yang semula lahan pertanian dan perkebunan menjadi lahan perumahan dan pertokoan yang pada gilirannya berakibat pada menurunnya hasil pertanian dan perkebunan masyarakat di wilayah kecamatan Cerbon.

4. Strategi yang disusun dan dirumuskan pemerintah Kabupaten Barito Kuala, khususnya Pemerintah Kecamatan Cerbon dalam mengantisipasi dampak yang timbul dengan adanya Jembatan Rumpiang adalah dengan meminimalisasikan dampak negatif dan mengoptimalisasikan dampak

positif keberadaan jembatan tersebut, melalui ; a) Menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan mampu berpartisipasi dalam pembangunan yang dilaksanakan sebagai wujud dari upaya pembangunan masyarakat Kecamatan Cerbon seutuhnya berbasis pada sosio kultural yang terintegrasi, dengan menempatkan manusia sebagai sentral, mengingat peran dan partisipasi serta keterlibatannya baik sebagai subjek maupun sebagai objek pembangunan, b) Melakukan Mapping (pemetaan) terhadap berbagai permasalahan pembangunan mulai dari aspek geografis, aspek ekonomi, aspek sosial budaya, dan infrastruktur dengan mengacu pada pengembangan peluang dan kesempatan kerja serta berusaha bagi masyarakat Kecamatan Cerbon, dan c) Menyusun desain tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih dari kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN). Menumbuhkan rasa memiliki terhadap kesempatan, peluang, ancaman, dan tantangan pembangunan menuju peningkatan kemampuan pembangunan yang bertumpu pada kesadaran akan tanggung jawab dan tugas sebagai kalifah di muka bumi.

S a r a n

Memperhatikan dampak yang ditimbulkan oleh keberadaan Jembatan Rumpiang dan berbagai upaya, kebijakan serta strategi yang disusun oleh pihak pemerintah Kecamatan Cerbon dalam mengantisipasinya, agar upaya kebijakan dan strategi dimaksud dapat berjalan secara optimal, disarankan :

1. Usulan program dan pembangunan yang dilaksanakan di wilayah kecamatan Cerbon diprioritaskan pada upaya pengentasan kemiskinan dan

penyediaan lapangan kerja mandiri sebagai pengganti lahan usaha yang hilang dengan keberadaan Jembatan Rumpiang.

2. Melibatkan seluruh unsur dan lapisan masyarakat di pedesaan dalam pelaksanaan pembangunan dengan memperhatikan usulan dan skala prioritas yang disusun dalam kegiatan musrenbangdes, agar tercipta dan timbul rasa memiliki masyarakat atas prasarana, sarana, dan fasilitas yang ada di lingkungan dan wilayah kecamatan Cerbon serta terjaga keberadaan dan kelestariannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, A. 2005. **Ketimpangan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan : Tinjauan Kritis**. P4Wpress. Bogor.
- Iwan Nugroho dan Rokhmin Dahuri, 2004, **Pembangunan Wilayah Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan**, LP3ES, Jakarta.
- Samodra Wibawa, et al, 1994 **Evaluasi Kebijakan Publik**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakara.
- Sugiyono, 2007, **Metode Penelitian Administrasi**, CV. Alfabeta, Bandung
- Surakhmad, Winarno, 2013, **Dasar dan Teknik Research**, CV. Tarsito, Bandung
- Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang